



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**DINAS BINA MARGA**

Gedung Dinas Teknis Jatibaru Lt. 11-14 Jalan Taman Jatibaru No.1  
Telepon/Faxsimile (021) 3840236 – 38469626  
Website: binamarga.jakarta.go.id  
J A K A R T A

Kode Pos 10150

31 Juli 2023

Nomor : 2925/HM.10-02  
Sifat :  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Hal : Penyampaian Usulan  
Daftar Informasi yang  
Dikecualikan

Kepada  
Yth. Plt. Kepala Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik  
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Menindaklanjuti surat dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta nomor 1552/HM.10.02 tanggal 24 Juli Tahun 2023 perihal Penyampaian Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan dan merupakan tindak lanjut Rapat Pembahasan Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada hari Kamis, 27 Juli 2023 di Ruang Rapat Sekretaris Dinas Bina Marga Lt.11 Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, bersama surat ini dapat kami sampaikan usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Bina Marga  
Provinsi DKI Jakarta,



Tembusan :

1. Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
3. Plh.Kepala Bidang Kelengkapan Jalan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bidang Penerangan Jalan dan Sarana Umum Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Bina Marga Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Unit Pengadaan Tanah Bina Marga Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Pusat Data dan Informasi Bina Marga Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta

Lampiran Penyampaian Usulan Daftar  
Informasi yang Dikecualikan  
Nomor : 2025/HM.10.02  
Tanggal : 31-7-2025

**Daftar Usulan Informasi Yang Dikecualikan/ Rahasia  
Nama Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah**

NO	NAMA/ KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/ PENTINGNYA BAGI PUBLIK	
				JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP
1	Dokumen kontrak	a. UU No 14 Tahun 2008 b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	3 tahun dengan catatan apabila dibuka data pribadi harus dilindungi (sensor)	dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi yang dapat disalahgunakan	melindungi data pribadi dari penyalahgunaan
2	Perencanaan teknis Jalan, Jembatan, Trotoar dan Pencanhayaan Kota	Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	3 tahun dengan catatan apabila dibuka data pribadi harus dilindungi (sensor)	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam pengadaan	Melindungi hak atas kepentingan intelektual
3	Rincian tentang pembayaran, perhitungan biaya, atau kondisi keuangan yang mungkin dianggap rahasia komersial atau privasi.	Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Sampai dengan terbitnya opini audit Laporan Keuangan dari BPK	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam pengadaan	Melindungi hak atas kepentingan intelektual
4	Data Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Tanda Tangan,	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi dan seseorang	Melindungi data dan informasi pegawai

NO	NAMA/KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/ PENTINGNYA BAGI PUBLIK	
				JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP
	Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan, Rekening Bank, Aset, Pendapat, dan Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun nonformal	<p>b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>		d. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	
5	Nama Pengguna Kendaraan pada Daftar Kendaraan Dinas Operasional	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis	Dapat membahayakan keamanan Pejabat Pemerintahan	Melindungi keamanan Pejabat Pemerintahan
6	Dokumen SPJ keuangan yang belum diaudit	<p>a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>c. Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>a. Terbuka sampai Audit Keuangan selesai</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis</p>	<p>a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang</p> <p>b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat</p> <p>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang</p> <p>d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p>	<p>a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>b. Melindungi data dan informasi pribadi</p>

NO	NAMA/ KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/ PENTINGNYA BAGI PUBLIK	
				JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP
7	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. 10 tahun b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	a. Menghindari penyalahgunaan informasi b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi c. Menjaga keakuratan data dan informasi
8	Surat Penyediaan Dana	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. 10 tahun b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	a. Menghindari penyalahgunaan informasi b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi c. Menjaga keakuratan data dan informasi
9	Dokumen Penawaran Teknis	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. 5 tahun b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat

NO	NAMA/KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/ PENTINGNYA BAGI PUBLIK	
				JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP
10	Gambar pada lampiran kontrak	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. 5 tahun b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat
11	Dokumen Legalitas terdiri dari: 1) Akta Perusahaan 2) Izin Perusahaan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. 5 tahun b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat



NO	NAMA/ KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/ PENTINGNYA BAGI PUBLIK	
				JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP
				b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak	

Pt. Kepala Dinas Bina Marga

Prayitno, DKI Jakarta,



NIP. 196805071998031007